

PENGELOLAAN TINGGALAN ARKEOLOGI: KEGIATAN PELESTARIAN SEBAGAI DAYA TARIK WISATA

***Archaeological Remains Management:
Conservation Activities as A Tourist Attraction***

Roby Ardiwidjaja¹⁾ dan Basuki Antariksa²⁾

¹⁾ Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Jalan Gatot Subroto No. 10, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Indonesia

²⁾ Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Jalan Gatot Subroto No. 10, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Indonesia

Pos-el: robby.ardiwidjaja@gmail.com

Naskah diterima: 10 Juni 2022 - Revisi terakhir: 8 Desember 2022

Disetujui terbit: 11 Desember 2022

Abstract

Indonesia is one of the largest archipelagic countries in the world, one of which is rich in cultural diversity in the form of values, ideas, behaviors, and cultural heritage materials from the past to the present. Cultural diversity, such as archaeological remains, which is an asset for recording the development of historical and cultural values forming the identity of the Indonesian nation's civilization, has developed massively as a tourist attraction that can generate income. As a result, it has impact on increasing economic exploitation of archaeological remains by the government, local government, industry, and society. Which in turn often consciously or not causes problems besides causing degradation of historical and cultural values, as well as the existence of these archaeological remains. For this reason, the diversity of archaeological remains as a national asset is important to managed and preserved sustainably through a sustainable tourism development approach. Scientific articles that aim to provide ideas or concept solutions are like library research carried out through qualitative descriptive analysis methods by relying on the availability of secondary data and information relevant to the topic, both in print and electronic form, from various sources. Hopefully, this article can be input into the process of solving problems and making decisions needed by the government in formulating policies for managing archaeological remains in a sustainable and integrated manner to strengthen conservation efforts for the benefit of the people's welfare.

Keywords: archeology; preservation; tourism; attraction; sustainable

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kekayaan keanekaragaman budaya baik dalam bentuk nilai, ide, perilaku maupun materi tinggalan budaya dari masa lalu hingga sekarang. Keanekaragaman budaya seperti peninggalan arkeologi yang merupakan aset rekaman perkembangan nilai kesejarahan dan kebudayaan pembentuk identitas peradaban bangsa Indonesia, telah berkembang

secara masif sebagai daya tarik atraksi wisata yang mampu mendatangkan pendapatan. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya eksploitasi ekonomi terhadap tinggalan arkeologi, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, industri, dan masyarakat. Eksploitasi terhadap tinggalan arkeologi seringkali secara sadar atau tidak, menyebabkan degradasi terhadap nilai kesejarahan dan kebudayaan, juga terhadap eksistensi peninggalan arkeologi tersebut. Untuk itu, keanekaragaman tinggalan arkeologi sebagai aset bangsa menjadi penting untuk dikelola dan dilestarikan secara berkelanjutan melalui pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Artikel ilmiah yang bertujuan memberikan gagasan atau konsep solusi ini, bersifat studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui metode analisis diskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengandalkan ketersediaan data dan informasi sekunder yang relevan dengan topik dalam bentuk cetak dan elektronik dari berbagai sumber. Diharapkan artikel ini dapat menjadi bahan masukan pada proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang diperlukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan tinggalan arkeologi secara berkelanjutan dan terpadu, dalam rangka memperkuat upaya pelestarian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: arkeologi; pelestarian; pariwisata; daya tarik; berkelanjutan

PENDAHULUAN

Sekarang ini dampak langsung globalisasi telah menghilangkan batas geopolitik suatu negara, termasuk di Indonesia. Dengan pengaruh global, dikhawatirkan menyebabkan terjadinya degradasi pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan kebudayaan dari warisan budaya. Kondisi ini dapat menimbulkan pelemahan karakter, bergesernya nilai etika, serta bergesernya nilai budaya dalam kehidupan berbangsa (Ardiwidjaja 2013). Selain itu, pengaruh globalisasi juga membawa perubahan paradigma dan tren pariwisata global, khususnya pada motivasi wisatawan. Mereka tidak lagi mencari hiburan dan kesenangan belaka, tetapi cenderung mencari kepuasan memperoleh pengalaman unik dan pengetahuan yang otentik (Cabrina 2004). Oleh karena itu, tantangan pengaruh global perlu diposisikan sebagai peluang dalam melestarikan keanekaragaman aset benda warisan budaya masa lalu, berupa tinggalan arkeologi. Pemanfaatan peluang ini dapat menempatkan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata kelas dunia berbasis budaya.

Dari beberapa sumber ditegaskan bahwa unsur kebudayaan merupakan yang paling diminati dan ingin diketahui oleh wisatawan yang berkunjung ke Asia dan kawasan Pasifik. Mereka tertarik untuk mengenal adat istiadat, kesenian, sejarah, bangunan kuna, dan peninggalan-peninggalan purbakala lain (Pendit, 2002). Meningkat pesatnya pasar wisata berbasis daya tarik tinggalan arkeologi yang dikenal juga sebagai arkeowisata (*archaeotourism*), menjadikan situs-situs tinggalan arkeologi dikembangkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah, industri, dan masyarakat sebagai daya tarik wisata (Ardiwidjaja 2018b).

Permasalahan pun timbul, situs tinggalan arkeologi dikembangkan lebih mengedepankan aspek ekonominya ketimbang upaya pelestariannya, yaitu dengan cara mendatangkan pengunjung sebanyak banyaknya di situs atau kawasan tinggalan arkeologi (Comer dan Willems 2011). Produk wisata arkeologi yang dikembangkan untuk menjaring jumlah kunjungan sebesar-besarnya (*mass tourism*) membawa dampak

kerusakan terhadap lingkungan situs, dan kurang dapat memberikan kepuasan bagi wisatawan dalam memperoleh pengalaman, dan pengetahuan baru yang unik serta otentik di situs tinggalan arkeologi (Walker 2005; Ardiwidjaja 2018b). Dampak tersebut pada dasarnya masih dapat diatur dengan menerapkan konsep tata kelola pengunjung (*visitor management*) yang akan mengendalikan kerusakan dan ancaman terhadap hilangnya nilai pengetahuan dan keberadaan dari tinggalan arkeologi sekecil mungkin (Enseñat-Soberanis, Frausto-Martínez, dan Gádara-Vázquez 2019).

Menurut pendapat Drost menyatakan bahwa situs tinggalan arkeologi yang telah menghasilkan pendapatan dan menarik minat publik berpeluang besar dapat mendukung upaya pelestarian berkelanjutan, apabila pendapatan dari pariwisata berkontribusi terhadap penyediaan sarana potensial untuk pelestarian dan pendidikan situs (Walker 2005). Oleh karenanya agar pengelolaan situs tinggalan arkeologi dapat berhasil dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu, diperlukan keterlibatan dan peran bidang atau disiplin ilmu lain dalam upaya perlindungan, pengembangan, hingga pemanfaatan (Sedyawati 2010). Salah satu bidang lain tersebut adalah pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Pariwisata berkelanjutan dapat ditempuh melalui pemanfaatan konsep pariwisata budaya berbasis tinggalan arkeologi. Konsep ini dapat diterapkan untuk mengangkat dan memperkuat kegiatan pelestarian nilai kesejarahan dan kebudayaan. Selain itu, konsep ini dapat mendudukkan situs tinggalan arkeologi sebagai daya tarik wisata.

METODE

Penelitian dalam artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang berorientasi pada kajian kritis dan mendalam terhadap data dan informasi sekunder yang relevan dari berbagai sumber, dalam bentuk cetak maupun elektronik. Menurut Zed (2004), penelitian kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan pengelolaan situs tinggalan arkeologi yang dihadapi. Lebih lanjut dijelaskan penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori terkait masalah dan peluang pengelolaan situs tinggalan arkeologi. Analisis deskriptif kualitatif terhadap bahan-bahan pustaka yang terkumpul dilakukan dengan menggunakan teknik penafsiran dan pemahaman teks, analisis isi, proses reduksi dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh diupayakan dapat memberikan usulan alternatif ide dan solusi permasalahan pengelolaan situs tinggalan arkeologi, melalui pengembangan dan pengemasan berbagai kegiatan pelestarian sebagai daya tarik wisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi Analisis

Dalam upaya memetakan dan menilai pokok-pokok permasalahan dan peluang yang ada, perlu dianalisis kondisi atau situasi penyelenggaraan pengelolaan tinggalan arkeologi dari berbagai sumber. Di beberapa negara, seperti Canada, Amerika, Itali, dan Laos, nilai ilmu pengetahuan (*scientific values*) dari keanekaragaman tinggalan arkeologi tidak sekedar hanya dilindungi, tetapi juga dari sisi nilai ekonomi (*economic values*) dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata melalui penyelenggaraan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan (Reddy et al. 2018; Jessa 2015; Whyte, Hood, dan White 2012; Ardiwidjaja 2017). Namun demikian, dalam prakteknya ekspansi berbagai pembangunan termasuk pariwisata, acapkali berdampak pada eksistensi kekayaan budaya baik yang berupa situs arkeologi, lansekap budaya, tradisi dan kehidupan keseharian masyarakat yang masih berjalan (Ardiwidjaja 2020a). Praktek-praktek tersebut secara tidak disadari telah mendorong terjadinya pencemaran dan kerusakan fisik serta penggerusan nilai, karena penyelenggaraan pariwisata yang tidak diposisikan sebagai alat penguatan pelestarian warisan budaya yang berkelanjutan.

Menurut Ardiwidjaja (2018), penanganan keberadaan fisik maupun nilai yang terkandung pada tinggalan arkeologi hingga kini dirasakan kurang optimal, masih sering terkendala karena faktor-faktor: (a) Apresiasi masyarakat yang masih rendah; (b) Upaya pelestarian oleh lembaga pemerintah baru sampai pada upaya mengumpulkan, melindungi, menyimpan dan merekonstruksi saja; (c) Tinggalan arkeologi memiliki nilai penting bagi masyarakat dan diminta masyarakat turut menjaganya, namun masyarakat belum merasakan manfaat; (d) Interpretasi nilai penting tinggalan arkeologi hasil riset hanya menjadi dokumen yang tidak tersampaikan kepada para *stakeholder*; (e) Keterbatasan pemerintah dalam mengelola tinggalan arkeologi yang sebagian besar tersebar di daerah pinggiran (*remote area*) dan perdesaan (*rural area*).

Satu peluang sebagai pertimbangan perlunya pendekatan pariwisata berkelanjutan berbasis tinggalan arkeologi (The Archaeological Institute of America 2001), dapat dilihat dari beberapa aspek strategis antara lain: (a) Aspek daya tarik. Keunikan tinggalan arkeologi mampu memotivasi wisatawan dan memberikan pengalaman pengetahuan baru dan tantangan petualangan untuk dapat mengaksesnya; (b) Aspek kesadaran dan kepedulian masyarakat. Melalui wisata dapat mendukung tujuan arkeologi publik untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kesejarahan atau budaya di destinasi; (c) Aspek pemberdayaan masyarakat. Wisata budaya melibatkan *stakeholder* untuk berperan dalam upaya pelestarian situs arkeologi; (d) Aspek ekonomi. Wisata budaya mampu menumbuhkan peluang kerja dan usaha aktivitas ekonomi masyarakat di destinasi wisata budaya; (e) Aspek keberlanjutan. Wisata budaya merupakan alat yang meningkatkan secara berkelanjutan dan terpadu pertumbuhan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan dengan tetap menjaga integritas identitas keindonesiaaan.

Lebih jauh lagi Cleere (2005) memberikan amatan pada dimensi ekonomi yang dapat dikembangkan tidak saja dalam memanfaatkan situs dan tinggalan arkeologi, akan

tetapi juga lebih melihat kebutuhan wisatawan secara holistik terhadap kebutuhan unsur-unsur budaya lainnya. Lebih jauh ditekankan bahwa wisata budaya dapat mengoptimalkan sekaligus mengemas upaya pelestarian tinggalan arkeologi sebagai daya tarik wisata budaya berbasis tinggalan arkeologi (Garrod dan Fyall 2000). Menurut Ardiwidjaja (2018b) pengemasan kegiatan pelestarian tinggalan arkeologi tersebut diharapkan akan mampu menjadi daya tarik aktivitas wisata minat khusus bersifat petualangan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman unik (*real experiences*), pengetahuan otentik (*authenticity scientific*), serta kreativitas (*creativity*).

Formulasi Strategi

Salah satu upaya meminimalisir kendala pemerintah dalam mengelola tinggalan arkeologi yang tersebar di daerah pinggiran adalah dengan menggunakan pendekatan pariwisata berkelanjutan melalui konsep pariwisata budaya berbasis tinggalan arkeologi (Rosenfeld 2000). Dalam pemanfaatan konsep pariwisata budaya sebagai alat memperkuat upaya pelestarian tinggalan arkeologi sekaligus sebagai daya tarik wisata, dibutuhkan berbagai strategi yang perlu dirumuskan (Ardiwidjaja 2018c).

Pertama, kesamaan cara pandang (paradigma) pariwisata global. (a) Pariwisata berhubungan dengan pergerakan sementara manusia bersifat silang budaya untuk berbagai tujuan, kecuali mencari nafkah; (b) Pariwisata terkait erat dengan atraksi dengan syarat harus unik yang hanya didapat dari sumber daya budaya serta alam bersifat endemik (langka); (c) Pariwisata merupakan perjalanan berkualitas memperoleh pengalaman unik dan pengetahuan otentik baru di destinasi; (d) Pariwisata merupakan proses ekonomisasi pengalaman dan pengetahuan yang mengandung semangat mencegah komersialisasi budaya dan alam; (e) Pariwisata tumbuh secara alami berbasis dari, untuk, dan oleh masyarakat dalam memanfaatkan daya tarik lingkungan alam dan budaya.

Kedua, arah pembangunan destinasi wisata budaya yang berkelanjutan (Ardiwidjaja 2013), pembangunannya harus: (a) Layak secara budaya setempat (*culturally appropriate*); (b) Secara sosial dapat diterima (*sosially accepted*) dalam kehidupan sosial dan aktivitas keseharian masyarakatnya saat ini dan mendatang; (c) Fokus pada masyarakat (*people centred*) dengan melibatkan peran masyarakat setempat sebagai pusat penerima manfaat; (d) Tidak diskriminatif (*indiscriminative*), karena tumbuh dari, oleh dan untuk kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat; (e) Ramah lingkungan (*environmentally sound*), menyesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, tinggalan arkeologi dan lingkungan budaya.

Ketiga, prinsip pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan. Destinasi wisata budaya berbasis tinggalan arkeologi perlu memperhatikan aspek yang memiliki nilai penting bagi *stakeholder*, mencakup nilai ekologis, sosial dan budaya, edukasi, rekreasi, ekonomi dan nilai estetik (Timothy 2009).

Keempat, pendekatan dalam pengembangan destinasi wisata budaya berbasis tinggalan arkeologi yang melibatkan peran lintas disiplin dan lintas sektor: (a)

Pelestarian tinggalan arkeologi. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tinggalan arkeologi di destinasi wisata mencakup nilai-nilai ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, sejarah, dan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat (Rabotić 2008). Oleh karenanya diperlukan upaya memperkuat kegiatan pelestarian tinggalan arkeologi yang ada di destinasi (Nasser 2003); (b) Interpretasi daya tarik. Tantangan utama dalam pariwisata adalah bagaimana interpretasi dari nilai penting keanekaragaman sumber daya alam dan budaya tersampaikan. Interpretasi merupakan pemaknaan atau penafsiran kembali nilai-nilai terkandung pada keanekaragaman daya tarik untuk dikomunikasikan kepada masyarakat dan wisatawan, baik dalam bentuk promosi maupun provokasi (Rabotić 2008); (c) Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism destination/STDes*). Pengembangan destinasi wisata budaya berbasis tinggalan arkeologi, perlu menerapkan pedoman pemerintah yang telah diakui secara internasional oleh *World Tourism Organization*, untuk mencapai kriteria dan indikator pariwisata berkelanjutan; (d) Kesiapan adaptasi baru (*new normal*). Dalam mendukung para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif di destinasi dari keterpurukan akibat pandemi, pemerintah telah mengeluarkan pedoman protokol kesehatan berbasis kebersihan, kesehatan, kemanan dan kelestarian lingkungan atau disebut CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*), yang dapat diunduh pada situs: <https://CHSE.kemenparekraf.go.id/pedoman>.

Implementasi Strategi

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan serta strategi yang telah dirumuskan sebagai rambu-rambu pembangunan, maka pengembangan destinasi wisata budaya berbasis tinggalan arkeologi perlu terlebih dahulu melakukan pemetaan (*mapping*) dan penilaian (*assessment*) potensi sumber daya untuk tujuan mendapatkan informasi sumber daya dan daya tarik yang ada di destinasi (Inskeep 1991; Gunn 1988). Informasi tersebut diperlukan untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan yang diperlukan dalam merumuskan kebijakan pengembangan destinasi dan penyelenggaraan wisata budaya berbasis tinggalan arkeologi (Council 2009). Informasi yang dihasilkan dari kegiatan ini harus dapat menggambarkan komponen utama pariwisata.

Pertama, daya tarik destinasi wisata. Memotivasi orang berkunjung ke destinasi wisata budaya berbasis tinggalan arkeologi, harus dapat menjawab kebutuhan pengunjung terhadap *what to see, what to do, what to buy, what to eat, where to stay, dan how to get there* dari daya tarik yang dimilikinya. (a) Daya tarik atraksi yang mengakomodasi kebutuhan "*what to see*" mengacu pada atraksi utama (*core attractions*) seperti tinggalan arkeologi yang bergerak maupun tidak bergerak (Rosenfeld 2000). Kemudian atraksi pendukung (*supporting attractions*) seperti kehidupan keseharian, adat istiadat, dan tradisi masyarakat setempat. Unsur budaya (Gambar 1) dalam sistem kebudayaan yang dapat diangkat sebagai daya tarik wisata utama berupa tinggalan arkeologi dan daya tarik wisata pendukung baik yang bersifat material kebendaan (*tangible*) dan bukan benda (*intangible*) dari warisan budaya masa lalu (*cultural*

heritage) hingga budaya sekarang yang masih dijalankan oleh pendukungnya (*living culture*); (b) Aksesibilitas yang mengakomodasi "how to get there" terkait sarana dan prasarana yang memberikan pengunjung kemudahan dan kenyamanan konektivitas keluar dan masuk destinasi serta ke atraksi; (c) Amenitas yang mengakomodasi "what to eat, what to buy, where to stay" berupa fasilitas memadai dan menampilkan kelokalan seperti penginapan (*homestay*) dan tempat makan, serta fasilitas lainnya seperti sentra cenderamata, pusat informasi, pusat kesehatan dan tempat ibadah; (d) Aktivitas yang mengakomodasi "what to do" dan mampu memberikan pengalaman unik dan pengetahuan otentik yang baru dengan mengemas aktivitasnya dari keterlibatan atau interaksi fisik dengan upaya pelestarian lingkungan budaya termasuk tinggalan arkeologi dan konservasi lingkungan alam yang ada di destinasi (Ardiwidjaja2018a).



Gambar 1. Unsur dalam sistem kebudayaan (Sumber: The Fine Art Department (FAD) of Thailand, 1999).

Kedua, pasar wisatawan. Destinasi wisata budaya berbasis tinggalan arkeologi merupakan destinasi bagi wisatawan minat khusus terhadap objek atau kegiatan yang ada di suatu destinasi wisata (Kruja dan Gjyrezi 2011). Tren wisatawan global memberikan gambaran wisata minat khusus berorientasi pada kepuasan memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru yang unik, petualangan, edukasi, keaslian, interaksi, dan integritas dalam menikmati daya tarik di destinasi (Buckley 2006; Weber 2001).

Ketiga, produk wisata. Pariwisata budaya menampilkan atraksi budaya yang bersifat *tangible* seperti tinggalan arkeologi maupun *intangible* seperti tradisi dari budaya yang masih dijalankan (*living culture*) masyarakat (Gamble 2015; Lane 1994). Pengembangan destinasi wisata budaya berbasis tinggalan arkeologi, membutuhkan pengemasan produk wisata yang melibatkan wisatawan secara aktif, semi aktif, dan

pasif, terutama dalam aktivitas pelestarian budaya dan konservasi lingkungan alam sekitar destinasi (Tabel 1).

Tabel 1. Daya Tarik Aktivitas Pelestarian

AKTIVITAS PELESTARIAN LINGKUNGAN BUDAYA DAN KONSERVASI LINGKUNGAN ALAM	
Kegiatan	Aktivitas Pelestarian Cagar Budaya (UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya) :
Pelindungan:	: Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, Eskavasi, Pemugaran dan rekonstruksi Cagar Budaya.
Pengembangan:	: Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan yang tidak bertentangan tujuan Pelestarian.
Pemanfaatan:	: mendayagunakan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Kegiatan	Aktivitas Pelestarian Kebudayaan (UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan) :
Perlindungan:	: Inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi objek pemajuan kebudayaan
Pengembangan:	: penyebarluasan, pengkajian dan pengayaan keberagaman objek pemajuan kebudayaan.
Pemanfaatan:	: internalisasi nilai budaya, inovasi, adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintasbudaya dan kolaborasi antarbudaya.
Pembinaan:	: peningkatan pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM Kebudayaan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan
Kegiatan	Aktivitas Konservasi sumberdaya alam hayati (UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem) :
Perlindungan	: sistem penyangga kehidupan melalui penetapan wilayah, pembinaan dan pengaturan cara pemanfaatan wilayah,
Pengawetan	: keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya dengan menjaga keutuhan kawasan suaka (habitat flora fauna) agar tetap alami.
Pemanfaatan	: secara lestari SDA dan ekosistemnya dengan menjaga kelestarian fungsi kawasan, potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Sumber: UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2010 & UU No. 5 Tahun 1990

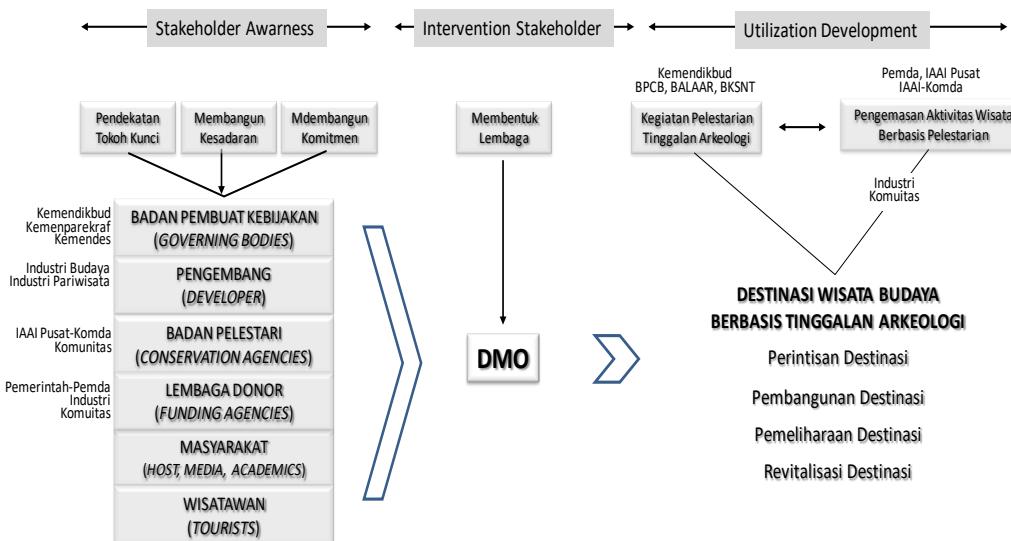
Keempat, Kebijakan. Dalam penyelenggaraan destinasi wisata budaya berbasis tinggalan arkeologi, diperlukan berbagai landasan sebagai rambu agar pengembangan pariwisata budaya sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian (Tabel 2) (Ardiwidjaja 2013; Reddy et al. 2018);

Tabel 2. Kebijakan Terkait dengan Pariwisata Perdesaan

INTERNASIONAL	NASIONAL	DAERAH
<ol style="list-style-type: none"> 1. UNESCO: <ul style="list-style-type: none"> • Safeguarding Traditional and Popular Culture of 1989 dan 2003 • UNWTO 1999, kesepakatan mempromosikan pelestarian warisan budaya melalui pariwisata berkelanjutan. • Universal Declaration on Cultural Diversity of 2001, • UNESCO Convention on Culture Tourism 2. World Summit 1992 dan 2002 tentang Pembangunan berkelanjutan 3. Charter For Pariwisata berkelanjutan 1995 4. The Hue Declaration on Cultural Tourism and Poverty Alleviation 2004; 5. ICOMOS 1999 International Cultural Tourism Charter 6. WTO Tourism Code Of Conduct 7. Deklarasi Yogyakarta tentang pariwisata budaya dan pemberdayaan masyarakat, 2006 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 • UU No 10 Th. 2009 tentang Kepariwisataan • UU No. 11 Th. 2010 tentang Cagar Budaya • UU No. 23 Th. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup • UU No 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah • UU No 6 Th. 2014 tentang Desa • PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa • PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa • Instruksi Presiden RI No. 16 Th. 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata • PP Republik Indonesia nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 – 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Desa dan Desa Adat • Pengusahaan Pariwisata • Investasi • Lembaga Pengelola 2. RIPPPDA 3. Adat Istiadat dan Kearifan Lokal 4. Licensi Masyarakat Lokal

Sumber: Ardiwidjaja, 2013

Kelima, Organisasi tata kelola destinasi. Keberhasilan pengembangan destinasi wisata budaya berbasis tinggalan arkeologi yang multi disiplin dan multi sektor, tidak lepas dari keterlibatan para pemangku kepentingan. Menurut Presenza (2016), peran dan partisipasi para pemangku kepentingan secara prinsip memerlukan komitmen bersama untuk berperan sesuai dengan hak dan kewajibannya dengan mengikuti etika yang telah ditentukan. Pelibatan dan komitmen bersama tersebut dimungkinkan dilakukan dengan pendekatan *Destination Management Organization* (DMO) dan *Destination Governance* (DG), merupakan wadah untuk bersama-sama menerapkan tata kelola destinasi secara partisipatif, sistemik, kolaboratif, berkelanjutan, dan terukur (Gambar 2).



Gambar 2. Organisasi tata kelola destinasi (Sumber: (Ardiwidjaja 2020b).

SIMPULAN

Pariwisata jenis apapun, termasuk wisata berbasis daya tarik situs tinggalan arkeologi, diyakini selalu akan membawa dampak kerugian serius apabila tidak dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Kesadaran akan dampak negatif merupakan langkah pertama yang positif dalam melestarikan sekaligus menikmati keunikan destinasi wisata tinggalan arkeologi. Wisata tinggalan arkeologi akan lebih optimal apabila terdapat pemandu yang menguasai interpretasi lokasi, nilai kesejarahan, dan budaya situs tinggalan arkeologi. Tujuan utama pengembangan destinasi wisata berbasis tinggalan arkeologi adalah untuk melestarikan nilai dan keberadaan tinggalan arkeologi. Selain itu, destinasi berbasis tinggalan arkeologi dapat menjadi salah satu upaya pelestarian, di mana objek arkeologi menjadi bagian dari daya tarik bagi pengunjung dalam memperoleh pengalaman unik dan pengetahuan otentik dari destinasi.

Rekomendasi

Rekomendasi yang diusulkan penulis, adalah (a) Perlu pelibatan para pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan upaya pelestarian terhadap nilai dan keberadaan

tinggalan arkeologi di destinasi; (b) Perlunya memposisikan bidang pariwisata sebagai salah satu pendekatan dalam memperkuat upaya pelestarian khususnya di kawasan situs arkeologi; (c) Penyelenggaraan wisata budaya berbasis tinggalan arkeologi harus mampu mengemas kegiatan pelestarian menjadi daya tarik aktivitas wisata berbasis edukasi; (d) Interpretasi (*story telling*) harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan atraksi untuk dikomunikasikan kepada semua yang berkepentingan (*stakeholder*), termasuk wisatawan. Hal ini perlu dilakukan agar *stakeholder* dan wisatawan dapat memperoleh pemahaman dan pengetahuan akan fakta kesejarahan dan kebudayaan sebagai identitas masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiwidjaja, Roby. 2013. *Pengembangan Destinasi Pariwisata Berbasis Lingkungan*. Jakarta: Kepel Press.
- . 2017. “Pelestarian Tinggalan Budaya Bawah Air: Pemanfaatan Kapal Karam Sebagai Daya Tarik Wisata Selam.” *Amerta* 35 (2): 133–48.
- . 2018a. *Adventure Tourism: Alat Percepatan Pembangunan Pariwisata Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- . 2018b. “Arkeowisata: Mengembangkan Daya Tarik Pelestarian Warisan Budaya.” Yogyakarta: Deepublish.
- . 2018c. *Arkeowisata Mengembangkan Daya Tarik Pelestarian Warisan Budaya*. Yogyakarta: Deepublish.
- . 2020a. *Pariwisata Budaya Pelestarian Budaya Sebagai Daya Tarik Ke-Indonesiaan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- . 2020b. “Policy Brief Evaluasi Dan Revitalisasi DMO-DG.” Jakarta.
- Buckley, Ralf. 2006. “Adventure Tourism Research: A Guide to the Literature.” *Tourism Recreation Research* 31 (2): 75–83. <https://doi.org/10.1080/02508281.2006.11081265>.
- Cabrini, Luigi. 2004. “Trends of International Tourism.” *Changes in Tourism’ Day*. Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht, The Netherlands.
- Cleere, Henry. 2005. *Archaeological Heritage Management in the Modern World*. Vol. 9. New York: Routledge.
- Comer, D.C., and W.J.H. Willems. 2011. “Tourism and Archaeological Heritage: Driver or Destruction?” *17th ICOMOS General Assembly Symposium*, 506–18.
- Vermont Arts Council. 2009. *Cultural Heritage: Tourism Toolkit*. Vermont, New England-USA: Queen City Printers.
- Enseñat-Soberanis, Fernando, Oscar Frausto-Martínez, and Manuel Gándara-Vázquez. 2019. “A Visitor Flow Management Process for Touristified Archaeological Sites.” *Journal of Heritage Tourism* 14 (4): 340–57.
- Gamble, Jordan Robert. 2015. “Living Culture and Tourism in Scotland,” *Edinburgh Napier University* 1 (2015): 1-33. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14602.47048>.
- Garrod, Brian, and Alan Fyall. 2000. “Managing Heritage Tourism.” *Annals of Tourism*

- Research 27 (3): 682–708.
- Gunn Clare A. 1988. *Tourism Planning*. New York Taylor & Francis.
- Inskeep Edward. 1991. *Tourism Planning*. New York : J. Wiley.
- Jessa, Sirhan. 2015. “Cultural Heritage Regeneration of District Six : A Creative Tourism Approach.” Cape Peninsula University of Technology.
- Kruja, Drita, and Albana Gjyrezi. 2011. “The Special Interest Tourism Development and the Small Regions.” *Turizam* 15 (2): 77–89. <https://doi.org/10.5937/turizam1102077k>.
- Lane, Bernard. 1994. “Sustainable Rural Tourism Strategies: A Tool for Development and Conservation.” *Journal of Sustainable Tourism* 2 (1–2): 102–11. <https://doi.org/10.1080/09669589409510687>.
- Nasser, Noha. 2003. “Planning for Urban Heritage Places: Reconciling Conservation, Tourism, and Sustainable Development.” *Journal of Planning Literature*, 17(4), 467–479. <https://doi.org/10.1177/0885412203251149>.
- Pendit N. S. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Presenza, Angelo. 2016. “The Performance of a Tourism Destination. Who Manages the Destination ? Who Plays the Audit Role ?” *Social Science I* (February): 1–14.
- Rabotić, Branislav. 2008. “Tourist Guides as Cultural Heritage Interpreters: Belgrade Experience with Municipality-Sponsored Guided Walks for Local Residents.” In *The Proceedings Book of the International Tourism Conference “Cultural and Event Tourism: Issues & Debates,”* 213–33.
- Reddy, Gerry, Eddie Smyth, and Michael Steyn. 2018. *Cultural Heritage Tourism. Partners for Livable Communities*. Washington, DC: Partners for Livable Communities. <https://doi.org/10.4324/9781351285605-17>.
- Rosenfeld, Raymond A. 2000. *Cultural and Heritage Tourism*. Eastern Michigan University.
- Sedyawati Edi. 2010. *Budaya-Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- The Archaeological Institute of America. 2001. *Guide to Best Practices*. <https://www.archaeological.org/pdfs/AITourismGuidelines.pdf>.
- The Fine Art Department (FAD) of Thailand. 1999. *Cultural System: For Quality Management*. Bangkok: The Fine Arts Department.
- Timothy, Dallen J. and Gyan P. Nyaupane, (eds). 2009. *Cultural Heritage and Tourism in The Developing World*. Routledge.
- Walker, Cameron. 2005. “Archaeological Tourism: Looking For Answers Along Mexico’s Maya Riviera.” *NAPA Bulletin 23, Archaeological Tourism*, 60–76. www.ucpress.edu/journals/rights.htm.
- Weber, Karin. 2001. “Outdoor Adventure Tourism a Review of Research Approaches.” *Annals of Tourism Research* 28 (2): 360–77. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(00\)00051-7](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(00)00051-7).

Whyte, Bruce; Hood, Terry; and White, Brian P (eds). 2012. *Cultural and Heritage Tourism: A Handbook for Community Champions*. Québec: Federal Provincial Territorial Ministers of Culture and Heritage.
http://municipaltoolkit.org/UserFiles/Rosenfeld_EN.pdf.

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.